

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA
ATAS INISIATIF WALIKOTA SALATIGA**



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP RAPERDA
ATAS INISIATIF WALIKOTA SALATIGA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Berkah Dalem.

Om swasti astu.

Sir astu swasti prajabayah.

Yth. Sdr. Pj.Walikota Salatiga.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Segenap Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yth. Para Pimpinan SKPD, Para Camat dan Lurah se Kota Salatiga.

Yth. Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga.

Yth. Para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

Merdeka !!!!

Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat AllahTuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga .

Rapat paripurna yang terhormat,

Bahwa Prolegda tahun 2024 eksekutif telah mengajukan rancangan peraturan daerah, 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Walikota terdiri sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
2. Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh
3. Raperda tentang Perlindungan Anak
4. Raperda tentang Jasa Konstruksi

Menyikapi 4 Raperda inisiatif sdr. Walikota tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga memandang perlu menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Secara garis besar Fraksi PDI Perjuangan mendukung disusunnya Perda tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Hal tersebut karena untuk memberikan jaminan / payung hukum bagi masyarakat yang melakukan usaha. Perda tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait dengan jaminan berusaha sekaligus sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dalam berusaha. Kehadiran Pemerintah Daerah terkait dengan penegakan Perda adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan usaha, bahwa perda ini tidak untuk membelenggu/membebanikan kalangan usaha tetapi justru pemerintah harus bias meyakinkan dengan Perda ini kalangan usaha / masyarakat memperoleh perlindungan secara hukum.

2. Raperda Tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh

Pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan mendukung dengan adanya Perda Pemekaran Kelurahan mangunsari dan Kelurahan Dukuh sebagai Bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi dari Perda tersebut diharapkan akan semakin memperkecil / mengurangi keluhan masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah Kota sekaligus untuk mengatasi proses pembangunan yang kurang merata. Pemekaran ini juga diharapkan akan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dalam partisipasinya pada percepatan pembangunan Kota Salatiga.

3. Raperda Tentang Perlindungan Anak

Fenomena kehidupan dan pendidikan generasi penerus tidak akan terlepas dengan bagaimana kita memperlakukan, mendidik dan membangun karakter anak-anak yang akan kita persiapkan sebagai generasi penerus. Keterjaminan terhadap keamanan dan perlindungan anak-anak yang akan kita persiapkan sebagai generasi penerus yang berkarakter baik, berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita bangsa perlu dibentuknya perda tentang perlindungan anak.

Fraksi PDI Perjuangan memandang serius pentingnya perda ini mengingat kesuksesan menuju Indonesia Emas sangat tergantung dengan Sumber Daya Alam manusia, sehingga kesiapan generasi penerus / anak-anak sangat diperlukan adanya jaminan terkait keberlangsungan pendidikan dan perlindungan terhadap anak-anak.

4. Raperda Tentang Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, social dan budaya (Ekososbud) yang berperan sangat penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran untuk menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Jasa konstruksi mempunyai peran untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa, semua itu sebagai pendukung perekonomian daerah. Pada sisi lain, sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan Masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung / prasarana aktifitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini mendukung sekali terbentuknya raperda tentang Jasa Konstruksi, Dan dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam jasa konstruksi di kota salatiga, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang jasa konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi : Asas, tujuan dan ruanglingkup, Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan jasa Kontruksi, Pelatihan tenaga trampil kontruksi, Sistem informasi jasa konstruksi, Penerbitan izin usaha, Evaluasi dan Pengawasan, Sanksi Administratif, serta mengenai Pembiayaannya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Tuhan Memberkati kita Semua....

Om Santi -Santi - Santi om.....

MERDEKA !!!

Salatiga, 20 Juni 2024

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA SALATIGA**

Ketua : Sarmin, S.Pd
Wk. Ketua : H. M. Kemat, S.Sos
Sekretaris : Dra. Novia Praptiningsh
Anggota : 1. Dance Ishak Palit, M.Si
 2. Bagas Aryanto, SP
 3. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si
 4. Fardhila Retno Herdhini, SE
 5. Bonar Novi Priatmoko, SH